

**BAB II**

**PERKEMBANGAN POLITIK LUAR NEGERI KOREA SELATAN  
TERHADAP KOREA UTARA DAN AMERIKA SERIKAT, SEBELUM  
DAN PADA MASA KRISIS NUKLIR 2002**

**A. Dinamika Politik Luar Negeri Korea Selatan**

Politik luar negeri Korea Selatan dari masa ke masa banyak diwarnai dengan berbagai macam perubahan yang cukup signifikan. Perubahan ini terjadi karena dari setiap pemerintahan yang berkuasa memiliki pandangan politik luar negeri yang berbeda-beda. Perubahan ini dikarenakan setiap pemerintahan memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda pula, sehingga arah dan kebijakan dari sebuah pemerintahan dengan pemerintahan yang lain berbeda pula.

Dari beberapa pemerintahan yang telah dan sedang berkuasa ini dapat digolongkan menjadi dua rezim, yaitu rezim pemerintahan otoriter yang kebanyakan di bawah kepemimpinan militer dan rezim pemerintahan demokratis di bawah kepemimpinan sipil.

**1. Politik Luar Negeri Korea Selatan Di Bawah Pemerintahan Otoriter  
(1948 – 1987)**

Politik Luar Negeri Korea Selatan di awal masa pemerintahan lebih banyak dijalankan di bawah pemerintahan yang otoriter. Hal ini dikarenakan dari awal terbentuknya Republik Korea pemerintahan banyak dipimpin oleh kalangan militer yang berupaya untuk menertibkan kondisi dalam negeri yang belum dapat berjalan dengan stabil.

Di masa pemerintahan otoriter, Korea Selatan diwarnai dengan berbagai macam perubahan yang selalu mengikuti perkembangan jaman. Di awal terbentuknya Korea Selatan yaitu di masa pemerintahan Syngman Rhee, politik luar negeri Korea Selatan masih sangat sederhana dan tidak terlalu rumit. Hal ini dikarenakan di masa pemerintahan ini konflik dan permasalahan dalam negeri masih kerap mewarnai pemerintahan ini. Adapun

kebijakan luar negeri di masa pemerintahan ini adalah sebatas upaya agar fungsi dan sistem dalam negara mampu bertahan dari gejolak politik dalam negeri dan ancaman dari invasi Korea Utara. Kebijakan luar negeri yang cukup menyolok adalah hubungan dengan Amerika Serikat yang saat itu sangat erat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tetap mendukung negara Korea Selatan mampu bertahan dari gejolak politik dalam negeri dan juga ancaman akan datangnya invasi dari utara. Korea Selatan juga memelihara hubungan dengan negara-negara pengimpor hasil pertanian. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan devisa dari hasil pertanian. Di masa ini Korea Selatan masih sangat sederhana dan belum mengenal industrialisasi sehingga komoditi andalan dari negara ini adalah hasil pertanian. Oleh karena itu hubungan dengan luar negeri juga dibangun guna mendapatkan konsumen untuk hasil pertaniannya.

Di masa Park Chung Hee, laju perekonomian juga terus ditingkatkan melalui pembangunan perekonomian. Hubungan dengan Amerika Serikat didasarkan pada upaya untuk mendapatkan bantuan ekonomi dan militer. Pemerintahan Park yang memperoleh kekuasaannya dengan cara kudeta ini juga membangun jaringan keamanan negara yang tergolong bagus, di bulan Juni 1961, Dewan tertinggi Pembangunan Nasional membentuk Badan Intelejen Pusat Korea dengan Kim Jong – Pil sebagai ketuanya. Hanya dengan waktu tiga tahun, badan intelejen ini mampu membangun jaringan yang sangat erat dengan berbagai badan, baik yang ada di Korea Selatan maupun di luar negeri.<sup>1</sup>

Kemampuan pemerintahan republik ketiga ini dalam mendorong laju perekonomian yang terus maju tidak lepas dari kebijakan politik luar negerinya yang mulai terbuka dan berupaya menyerap ilmu pengetahuan dari negara lain.

Hasil dari politik luar negeri yang terbuka ini adalah semakin majunya perindustrian. Perindustrian Korea diawali oleh kebijakan pemerintah yang membuka diri terhadap masuknya budaya dan ilmu pengetahuan yang datang dari luar.

---

<sup>1</sup>Yang Seung – Yoon, Nur Aini Setiawati, *Sejarah Korea, Sejak Awal Abad Hingga Masa Kontemporer*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2003, hal 197

masyarakat Korea Selatan yang makmur dan sejahtera. Kemakmuran dan kesejahteraan inilah yang mampu dicapai melalui alih teknologi dan penyerapan teknologi asing.

## **2. Politik Luar Negeri Korea Selatan di Masa Pemerintahan Sipil**

### **a. Masa Pemerintahan Kim Young Sam (1992 – 1997)**

Politik luar negeri di masa pemerintahan ini juga masih menekankan pertahanan keamanan kawasan sebagai salah satu prioritas utama. Terbukti pada misi militer Korea Selatan di masa ini yang masih menekankan pertahanan terhadap agresi eksternal karena ancaman keamanan yang datang dari Korea Utara. Kemungkinan akan munculnya kembali kekuatan nuklir di perbatasan dua Korea juga menjadi perhatian utama dalam pertahanan keamanan Korea Selatan. Akan tetapi berbeda dengan pemerintahan sebelumnya, di masa pemerintahan Kim Young Sam ini kontrol militer sudah mulai dipegang oleh sipil, sehingga kebijakan luar negeri yang menyangkut pertahanan keamanan lebih bersifat persuasif.

Kebijakan utama lainnya di masa pemerintahan ini adalah dilakukannya reformasi politik. Reformasi politik yang dilakukan di masa pemerintahan Kim Young Sam ini cukup membawa kondisi positif terhadap hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. Walaupun tujuan utama pemerintahan ini adalah melakukan reformasi politik dengan usaha untuk menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*) akan tetapi hal ini juga berimbas pada kebijakan dari Kim Young Sam dalam hubungannya dengan Korea Utara. Salah satu contohnya adalah ketika pemerintahan Kim Young Sam membebaskan sekitar empat puluh ribu tahanan politik.

Dalam proses tersebut termasuk juga Mun ik Hwan yang ditangkap oleh *National Security Law* karena pembelotan ke Korea Utara pada tahun 1989 dan Li In Mo, seorang profesional komunis yang dipenjara sejak Perang Korea.<sup>2</sup>

Di masa pemerintahan Kim Young Sam inilah titik awal kebijakan persuasif dan lebih fleksibel terhadap Korea Utara dimulai. Walaupun demikian belum terlihat dengan jelas garis antara keberpihakan negara terhadap sekutu (Amerika Serikat) dengan upaya mendekati Korea Utara dengan cara yang persuasif.

### **Konsep Kebijakan Unifikasi Pemerintahan Kim Young Sam.**

Salah satu wujud nyata dari pendekatan persuasif terhadap Korea Utara adalah konsep kebijakan Unifikasi yang disusun di masa pemerintahan Kim Young Sam. Konsep Unifikasi yang disusun oleh pemerintahan ini adalah konsep pertama yang disusun oleh pemerintahan Korea Selatan saat Korea Selatan di bawah kepemimpinan pemerintahan sipil.

Kebijakan Unifikasi Administrasi Kim Young Sam secara garis besar telah disampaikan di saat upacara pelantikan pada 25 Februari 1993, Kim Menegaskan bahwa, “*apa yang diperlukan bukanlah emosionalisme tetapi konsensus nasional yang lebih rasional untuk mencapai cita – cita yang penting ini.*” Dia juga berpendapat:

*“sebuah konsensus negara adalah sebagai bagian prioritas dalam mempersiapkan unifikasi.”*<sup>3</sup>

Inti dari kebijakan ini adalah membantu Korea Utara untuk kembali beraktifitas dan berpartisipasi dalam masyarakat internasional sebagai anggota yang penuh, daripada mengisolasi diri yang menyebabkan sebuah beban bagi Korea Utara dan pada akhirnya melakukan perubahan sendiri.

---

<sup>2</sup>Victor D. Cha, “Politics Democracy Under Kim Young Sam Government, Something Old, Something New,” dalam *Asian Survey*, Vol XXX111, no 9 hal 854

---

<sup>3</sup>Korean Overseas Information Service, *Fact About Korea*, Republic Of Korea, Seoul 1995, hal 25

Korea Utara seharusnya menghancurkan kelambanannya yang disebabkan oleh pola pikir perang dingin dan berusaha untuk terlibat aktif dalam forum rekonsiliasi dan kerjasama dua Korea demi terciptanya unifikasi untuk mencapai kemakmuran bersama.

Tren global baru dan pemenuhan tuntutan dalam hubungan antara Korea sangat mempengaruhi pemberian suara negara dan kebulatan tekadnya dalam membangun sebuah persatuan, demokrasi dan kemakmuran tanah air. Menjaga sebuah perhatian yang tertutup terhadap kecurangan di lingkungan dalam negeri pada kebijakan unifikasi sama baiknya dengan kebijakannya terhadap Korea Utara itu sendiri.

### **Tahapan Proses Unifikasi**

Filosofi dasar dibalik kebijakan terbaru yang ditetapkan dalam membangun sebuah masyarakat nasional tunggal adalah berakar dalam nilai nilai kebebasan dan demokrasi, yang harus dipertahankan apapun yang terjadi. Tidak ada tantangan terhadap kebebasan dan demokrasi yang akan ditoleransi.

Proses unifikasi seharusnya berdasar pada nilai- nilai kebebasan, demokrasi dan kesejahteraan umum daripada beberapa ideologi yang hampir terfokus pada sebuah kelas atau kelompok khusus.

Proses unifikasi juga harus berkonsentrasi pada prinsip dengan membangun sebuah masyarakat nasional tunggal dimana semua Korea akan hidup bersama, daripada dengan membangun sebuah struktur hipotetis rancangan Amerika Serikat.

### **Prinsip Unifikasi**

Kemerdekaan : Unifikasi seharusnya dicapai pada persetujuan kedua Korea sendiri dengan kehendak rakyat Korea dan pada kekuatan kapabilitas nasional inherennya.

Perdamaian : Unifikasi seharusnya mencapai perdamaian, tidak lagi berpikir peperangan.

Demokrasi : Unifikasi seharusnya menjadi sebuah integrasi demokratis negara atas dasar kebebasan dan hak semua rakyat Korea.

### **Proses Unifikasi**

Unifikasi seharusnya dicapai dengan langkah yang setahap demi setahap, dengan tekanan pada pembangunan sebuah masyarakat nasional tunggal. Pada bagian akhir ini, formula Unifikasi komunitas masyarakat Korea memimpikan tiga tahap sebagai berikut :

#### - Rekonsiliasi dan kerjasama

Masih lekatnya permusuhan dan ketidakpercayaan antara selatan dan utara pada tahap ini harus dibangun saling kepercayaan dengan jalan saling mengakui sistem satu sama lain dan berjanji mematuhi kesepakatan dasar Utara – Selatan. Juga dalam tahap ini, dua negara ini akan memberi prioritas untuk memecahkan isu kemanusiaan seperti menata pertemuan kembali keluarga yang terpisah.

#### - Persemakmuran Korea

Pada tahap ini koeksistensi perdamaian dan kemakmuran dalam sebuah komunitas sosial – ekonomi tunggal. Pada tahap ini, Utara dan Selatan mewujudkan sebuah lingkungan kehidupan nasional yang biasa sebagai sebuah hubungan khusus antar – nasional, bukan sebagai hubungan negara-ke-negara. Juga dalam tahap ini selatan dan utara akan bekerjasama mendirikan sebuah dewan presiden dan sebuah dewan menteri dengan sebuah pandangan untuk memfasilitasi integrasi kebijakan pokok ketika delegasi parlemen dari kedua pihak tidak dapat menyepakati sebuah konstitusi penyatuan.

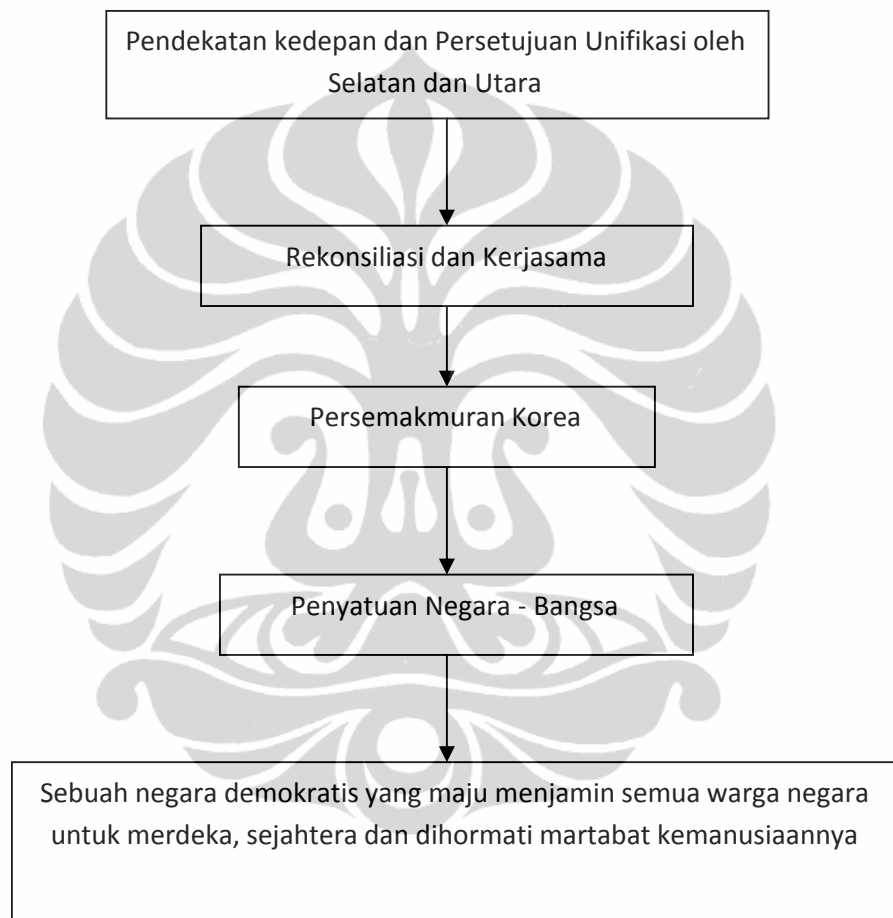
#### - Penyatuan Negara – Bangsa

Sebuah negara – bangsa tunggal adalah dilengkapi dengan integrasi penuh dari Utara – Selatan. Pada tahap ini, Utara dan Selatan mewujudkan

integrasi politik dengan membentuk sebuah legislatif dan pemerintahan gabungan dibawah prosedur yang demokratis sesuai dengan konstitusi gabungan, lalu menyelesaikan melengkapi unifikasi utama dengan sebuah sistem pemerintahan tunggal atas sebuah negara tunggal dalam satu negara.

Bagan.1

Bagan Konsep Proses Unifikasi Pemerintahan Kim Young Sam



Sumber : *Korean Overseas Information Service*, Republic Of Korea,Seoul

### **Visi Penyatuan Korea.**

Penyatuan Korea yang diharapkan oleh masyarakat Korea Selatan adalah sebuah negara yang tidak hanya mengikuti tradisi nasional dan budaya tetapi juga menjamin setiap individu bahagia dan kemakmuran nasional

dapat tercapai. Dasar nilai – nilai yang terbentuk dari visi dasar adalah kemerdekaan, kesejahteraan, dan martabat kemanusiaan.

Kata ”Kebebasan” disini berarti kesedihan dan pangkal kesusahan dari tiap bagian negara berkurang. Pemerintahan sendiri dan kreatifitas dari semua masyarakat dihormati, dan kebebasan ekonomi politik dijamin.

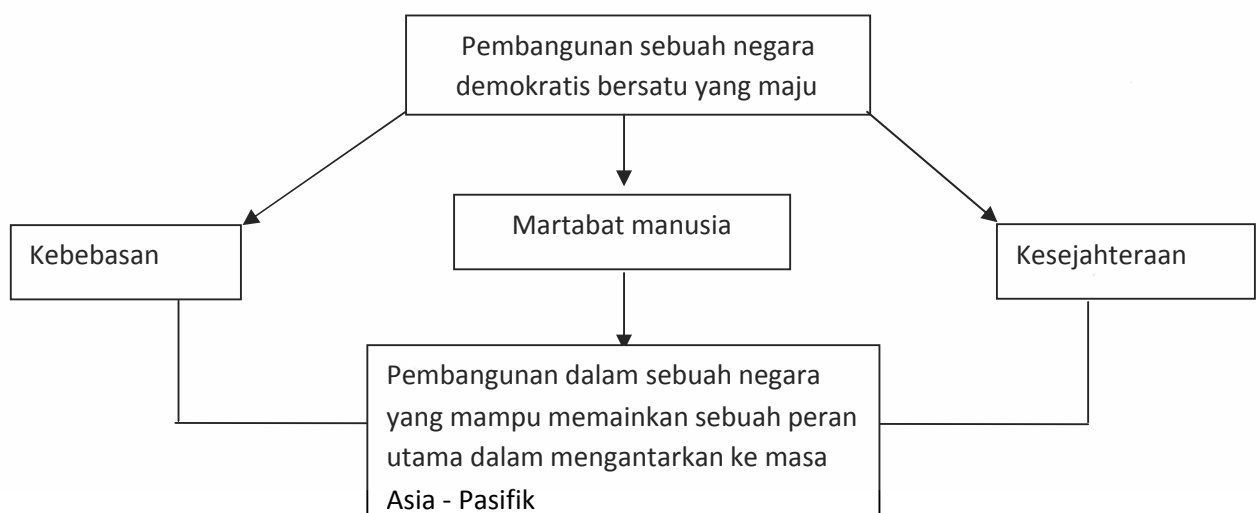
“Kesejahteraan” menunjuk kepada penciptaan sebuah kemakmuran ekonomi dengan perluasan yang substansial dari semua kapabilitas negara dan distribusi yang terbuka atas hasilnya diantara semua warga negara.

Tahap ”Martabat Manusia” berarti sebuah penghormatan untuk setiap individu berdasarkan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut yang didasarkan pada perintah undang undang dan dan peradilan. Akhir dari penderitaan manusia dan penganiayaan yang berasal dari bagian negara.

Dalam penyatuan Korea seharusnya rakyat Korea mencapai komunitas nasional tunggal yang setiap orang bisa menjadi penguasa, dan negara menjamin semua warga negaranya untuk mendapatkan kebebasan , kesejahteraan dan martabat manusia. Negara juga bisa memainkan perannya untuk datangnya masa Asia – Pasifik, dan negara juga berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran dunia.

Bagan.2

Bagan Cita Cita Unifikasi Pemerintahan Kim Young Sam





Sumber : *Korean Overseas Information Service*, Republic Of Korea, Seoul.

### **b. Masa Pemerintahan Kim Dae Jung (1997 – 2002)**

Di masa pemerintahan Kim Dae Jung ini, kebijakan politik luar negeri yang menonjol adalah kebijakan untuk membina hubungan dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam kaitannya dengan konflik historis semenjak Perang Korea. Di masa pemerintahan ini, kebijakan politik luar negeri terhadap Korea Utara cukup kooperatif dan dengan pendekatan yang lebih persuasif. Hal ini terjadi karena kebijakan presiden Kim yang ingin mencoba untuk mewujudkan kebijakan Matahari bersinar.<sup>4</sup> Sedang dibangun dalam setiap pengambilan keputusannya, termasuk juga dalam kebijakan politik luar negeri negerinya. Kebijakan matahari mengilhami Kim Dae Jung untuk merubah secara drastis kebijakan Selatan terhadap Utara yang selama ini terkesan kaku dan dan keras, sehingga tidak dapat tidak dapat menemukan titik temu yang dapat mengakhiri permasalahan yang ada. Sunshine Policy digulirkan oleh Kim Dae Jung dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan regim Pyongyang bahwa Seoul benar benar ingin mengadakan pendekatan melalui kerjasama dan pertukaran kunjungan antara dua negara. Hal itu terbukti dalam langkah langkah awal yang diambil oleh Korea Selatan untuk menunjukkan itikad baiknya terhadap Korea Utara, beberapa langkah yang penting yaitu :

Pertama, pemerintah memberikan kemudahan aktifitas inter – Korea dari sektor industri kecil dan menengah untuk secara bebas mengadakan hubungan perdagangan atau kerjasama ekonomi, namun atas resiko sendiri, seperti yang dilakukan oleh perusahaan Hyundai melalui proyek turisme dan pariwisata ke Gunung Kumgang di Korea Utara.

---

<sup>4</sup>*Shunshine Policy* atau lazim disebut sebagai kebijakan Matahari Bersinar, adalah nama yang diambil dari salah satu dongeng negeri Korea. Dalam cerita dongeng tersebut dikisahkan matahari dan angin yang berusaha keras agar seorang pria melepaskan jas yang dipakainya. Angin kendati keras berhembus tetapi gagal, akan tetapi matahari yang mengandalkan panasnya berhasil membuat pria tersebut melepaskan jas yang dipakainya itu. Kebijakan ini dipopulerkan oleh presiden Korea Selatan Kim Dae Jung untuk mendekati Korea Utara dalam rangka untuk menciptakan Reunifikasi Korea.

Kedua, melanjutkan proyek – proyek kerjasama berdasarkan prinsip timbal balik yang fleksibel, mengingat besarnya jurang perbedaan antara dua Korea atas kemampuan nasional secara menyeluruh.

Ketiga, membantu tanpa syarat kelangkaan pangan di Korea Utara karena keprihatinan kemanusiaan. Dalam hal ini Korea Selatan mengharapkan Korea Utara mengizinkan pertemuan dari keluarga yang terpisah.<sup>5</sup> Langkah awal yang dilakukan tersebut hanyalah sebagian kecil dari beberapa langkah yang mewarnai proses menuju upaya rekonsiliasi Selatan – Utara. Di masa pemerintahan Kim Dae Jung ini sebuah langkah penting untuk hubungan kedua negara bersaudara ini terlaksana, yaitu terselenggaranya Konferensi Tingkat Tinggi Inter Korea di tahun 2000, dengan terlaksananya KTT ini, sebuah babak baru dari hubungan kedua negara yang terpisah oleh ideologi yang berbeda ini telah dimulai. Kesepakatan – kesepakatan yang menuju pada arah reunifikasi dan rekonsiliasi dicapai, diantaranya tentang pertukaran keluarga yang terpisah, pembicaraan lebih lanjut tentang unifikasi, bantuan pangan, bantuan ekonomi dan energi, dan juga rencana pertemuan tingkat menteri (PTM) yang akan dilaksanakan setelah KTT usai.

Dalam KTT Inter Korea itu juga tercapai deklarasi bersama yang direalisasikan dengan mengatur pertukaran kunjungan antar anggota keluarga yang terpisah.

Pertemuan keluarga terpisah tahap I berlangsung pada tanggal 15 – 18 Agustus 2000 dan tahap kedua pada bulan Desember 2000 dimana masing – masing pihak mengirimkan seratus orang anggota keluarga untuk bertemu di Seoul dan Pyongyang. Demikian juga dengan kesepakatan untuk mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ( PTM ) dari Korea selatan, pertemuan yang dihadiri oleh delegasi yang terdiri dari menteri-menteri dari kedua negara ini terealisasi dari dan dicapai beberapa kesepakatan antara lain :

---

<sup>5</sup>kedutaan besar RI, Laporan tahunan, Buku Laporan inti, Seoul tahun 2000, hal. 20

Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 29 Agustus sampai 1 September 2000 di Seoul, kedua pihak setuju untuk membuka kantor-kantor prnghubung di Panumjom dan penyambungan kembali jalur kereta api Seoul – Sinuiju di Korea Utara

- Pertemuan kedua dilakukan pada tanggal 29 Agustus – 1 September 2000 di Pyongyang, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembicaraan tingkat pejabat militer yang guna membicarakan masalah *Confidence Building Measure* sesegera mungkin. Diadakannya dua kali lagi kunjungan keluarga terpisah sebelum akhir tahun 2000, serta kontak antar pejabat tingkat perumus ekonomi untuk mempercepat program pertukaran dan kerjasama ekonomi.
- Pertemuan ketiga dilakukan pada tanggal 27 – 30 September 2000 di Pulau Cheju, Korea Selatan. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah keluarga terpisah secepatnya. Setuju untuk membentuk komite bersama untuk mengimplementasikan proyek – proyek kerjasama ekonomi Inter – Korea.
- Pertemuan keempat dilakukan pada tanggal 12 – 15 Desember 2000 di Pyongyang. Korea Selatan bersedia mensuplai energi listrik sebesar lima ratus ribu KVA kepada Korea Utara. Dalam Pertemuan Tingkat Menteri keempat, kedua Korea menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ( P3B ) dan perlindungan investasi (IGA) dan menegaskan rencana pertemuan para anggota keluarga terpisah putaran ketiga pada akhir Februari 2001.<sup>6</sup>

Politik luar negeri di masa pemerintahan ini terhadap Amerika Serikat pada dasarnya adalah sebuah sikap yang menjaga hubungan diplomatik yang sejak perang Korea 1953 telah terjalin. Kebijakan politik luar negeri terhadap Amerika Serikat masih dibayangi karena hutang budi Korea Selatan terhadap Amerika Serikat yang telah menyelamatkan dari invasi Korea Utara di masa Perang Korea.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 9

Kebutuhan untuk menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat juga masih dirasakan hingga saat pemerintahan ini, karena hingga saat ini hanya Amerika Serikat yang mampu menjamin keamanan Korea Selatan dari invasi Korea Utara. Sebagai contoh kebijakan dari Korea Selatan untuk tetap latihan perang gabungan Korea Selatan – AS, langkah ini diambil adalah karena untuk tetap menjaga hubungan baik yang selama ini telah terjalin. Disamping itu Korea Selatan juga tetap mencoba menyelaraskan kebijakan antara Amerika Serikat – Korea Selatan terhadap Korea Utara. Dalam hal ini semangat *sunshine policy* ternyata juga berpengaruh terhadap hubungan antara Korea Selatan – Amerika Serikat, sebagai contoh akhirnya Amerika Serikat bersedia untuk menarik mundur pasukannya dari zona DMZ, seperti diikuti dari pernyataan kedua kepala negara tersebut:” *kedua pihak sepakat bahwa tujuan mendasar dari penarikan itu adalah meningkatnya keamanan Semenanjung Korea dan meningkatkan pertahanan bersama.*<sup>7</sup>

Kebijakan politik dari Korea Selatan walaupun terkesan tunduk dan bergantung pada peranan Amerika Serikat, akan tetapi sebenarnya di masa pemerintahan Kim Dae Jung ini juga mulai mempengaruhi dan mencoba untuk merubah opini Amerika Serikat terhadap Korea Utara.

Opini bahwa dengan cara cara tegas dan keraslah yang dapat menyelesaikan konflik AS – Korea Utara berubah perlahan lahan dan lebih menyelaraskan dengan konsep konsep yang lebih fleksibel dan persuasif yang lebih banyak digunakan oleh negara – negara di kawasan Semenanjung Korea termasuk juga Korea Selatan. Hal ini terbukti ketika di awal krisis nuklir Semenanjung Korea tahun 2002, cara cara kekerasan yang diinginkan oleh Amerika Serikat tidak mendapat dukungan dari Sekutunya di kawasan ini (Korea Selatan dan Jepang), dukungan yang diberikan justru adalah dukungan yang bersifat menjembatani terjadinya dialog antara dua negara yang bertikai ini.

---

<sup>7</sup>*Suara Pembaharuan*, 6 Juni 2003, ”Semenanjung Korea, AS tarik Pasukan dari DMZ”, hal 3

Karena kurangnya dukungan negara-negara di kawasan untuk menyikapi Korea Utara secara keras, terjadilah perpecahan di dalam administrasi George W. Bush. Dua kelompok yang berbeda ini adalah kelompok "hawkish" yang terdiri dari Wakil Presiden Dick Cheney dan beberapa pejabat sipil Pentagon seperti Menteri Pertahanan Rumsfeld dan wakilnya Paul Wolfowitz, kelompok ini cenderung menginginkan tindakan tegas terhadap Korea Utara dan isu program senjata nuklir Korea Utara merupakan alasan yang tepat untuk menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh rezim Kim Jong il. Sedangkan kelompok "dovish" adalah kelompok yang kurang sekuat dengan pendapat di atas, kelompok yang dimotori oleh menteri luar negeri Colin Powell ini cenderung bersedia melakukan dialog dengan pihak Korea Utara.<sup>8</sup> Dari uraian di atas terlihat bahwa kebijakan politik Korea Selatan turut mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh Amerika Serikat, terutama dalam menangani permasalahannya dengan Korea Utara.

### **C . Masa Pemerintahan Roh Moo Hyun (2002)**

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun usaha untuk mendekati Korea Utara dengan cara – cara yang lebih lunak terus diupayakan seperti pendahulunya.

*Sunshine Policy* yang terus didengungkan di masa Kim Dae Jung semakin diperbaharui dan disempurnakan dengan nama "Perdamaian dan Kesejahteraan". Bila dianalisa lebih dalam, Korea Selatan memiliki keyakinan yang lebih untuk dapat menyelesaikan krisis ini. Korea Selatan memiliki di masa pemerintahan Roh ini yakin akan kemampuan politik luar negerinya untuk menyelesaikan krisis secara damai, seperti yang dikutip dalam wawancara yang dimuat dalam surat kabar harian di Seoul, *Munhwa Ilbo*, Roh Moo Hyun mengatakan, negaranya adalah pemain kunci dalam kemelut nuklir Korea Utara. Menurut Roh, tujuan Seoul adalah mendorong Pyongyang untuk "menghindari kejatuhannya dan mengubah langkahnya melalui kerjasama". Upaya menyelesaikan krisis dengan jalan damai ditempuh juga oleh pemerintah Roh Moo Hyun dengan melaksanakan diplomasi *marathon* ke sejumlah negara diantaranya adalah Amerika Serikat,

---

<sup>8</sup> Laporan inti Kedutaan Besar RI di Seoul Tahun 2000., *Op.cit.*, hal 29

Jepang, dan RRC. Tema pokok diplomasi presiden Roh adalah stabilitas Semenanjung Korea. Upaya perundingan juga selalu ditawarkan oleh Roh dalam setiap kesempatan, dalam upaya menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara, Roh Moo Hyun menawarkan agar ada lima pihak yang turut serta dalam menyelesaikan konflik Amerika Serikat – Korea Utara itu. Lima pihak itu adalah Korea Utara, Amerika Serikat, RRC, Korea Selatan, dan Jepang.<sup>9</sup>

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun ini, politik luar negeri Korea Selatan mengalami perubahan dari pemerintahan sebelumnya. Keinginan untuk menjadi negara yang memiliki posisi yang sejajar dengan Amerika Serikat mewarnai kebijakan di masa pemerintahan ini.

Kesetaraan dan kesejajaran dalam membina hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat ini membuat kebijakan Korea Selatan menjadi lebih tegas dan jelas bila dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang masih terlihat tergantung dengan kehadiran Amerika Serikat dan peningkatan. Faktor inilah yang kemudian memacu Korea Selatan untuk mulai berjalan secara mandiri dan sedikit demi sedikit melepaskan diri dari intervensi asing, termasuk juga untuk menyelesaikan konflik dengan Korea Utara.

Kondisi yang semakin membaik dan proses demokratisasi yang berjalan lancar membuat hak asasi manusia (termasuk juga kemerdekaan untuk berpendapat) dari rakyat Korea Selatan dihormati dan diperhatikan oleh pemerintah yang berkuasa di Korea Selatan. Demikian juga sikap anti Amerika Serikat yang semakin keras disuarakan oleh rakyat Korea Selatan yang terus berkembang di masa pemerintahan ini. Sebagai contoh pada tanggal 15 Februari 2002 sekitar lima belas ribu polisi anti huru hara dikerahkan untuk mengantisipasi demonstrasi anti AS yang telah berlangsung beberapa hari di Seoul, bahkan bentrokan terjadi antara Polisi dengan sekitar seratus pengunjung rasa anti – Bush di dekat pangkalan udara militer tersebut. Sedangkan di jantung kota Seoul sekitar dua ratus orang yang terdiri dari biksu, pendeta, dan suster berunjuk rasa menentang kebijakan Amerika Serikat yang memprovokasi peperangan di Semenanjung Korea.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Koran Tempo*, 16 April 2003, ” Korea Selatan Mendesak segerakan Perundingan”, hal 11

<sup>10</sup>*Kompas*, 20 Februari 2003, ” Bush Tiba di Korea Selatan, Akan Bicarakan Persenjataan Korea Utara”, Hal 11

Menurut Seung- Hwan Kim, ada beberapa faktor yang mendasari terbentuknya sikap anti Amerika Serikat di Korea Selatan, beberapa faktor tersebut yaitu :

Pertama, kehadiran tiga puluh tujuh ribu tentara Amerika Serikat membawa ekses yang negatif di Korea Selatan, dimulai dari adanya insiden kecelakaan yang mengakibatkan tewasnya rakyat sipil. Kekecewaan rakyat Korea Selatan semakin besar ketika pemerintah Amerika Serikat dipandang tidak serius menangani berbagai ekses negatif tersebut. Kedua, adanya faktor perubahan demografis.

Jumlah generasi tua yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Amerika Serikat berkaitan dengan perang Korea sudah mulai berkurang dan digantikan oleh generasi muda yang, walaupun menyadari bahwa aliansi keamanan Amerika Serikat – Korea Selatan masih cukup penting untuk menghadapi ancaman Korea Utara, tetapi tidak bisa mentolerir persepsi tentang arogansi, dominasi, dan unilateralisme Amerika Serikat sebagai *Super Power* dunia.

Sebagian besar kaum intelektual di Korea Selatan menganggap sikap arogan dan unilateralisme Amerika Serikat tersebut telah merendahkan harga diri bangsa Korea dan sekaligus menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak loyal kepada Korea Selatan dalam rangka bersama – sama menciptakan stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Pernyataan presiden Bush yang mengkategorikan Korea Utara sebagai *Axis of Evil* membenarkan adanya persepsi tersebut. Pada masa sebelumnya, tercapainya *agreed Framework* antara Amerika Serikat dan Korea Selatan pada tahun 1994 untuk mengatasi masalah nuklir Korea Utara juga merupakan hasil upaya bilateral Amerika Serikat dan Korea Utara tanpa melibatkan Korea Selatan.

Ketiga, adanya faktor nilai yang terkandung dalam ideologi politik Korea Selatan, yaitu "*juche*" yang mengandung arti *Self Reliance* atau percaya kepada kemampuan sendiri. Filosofi *Juche* semakin meningkat saat adanya kemajuan ekonomi yang dialami oleh Korea Selatan selama ini, yang menjadikan Korea Selatan menuntut adanya independensi politik dan keamanan dari pihak Amerika Serikat. Walaupun tuntutan yang memiliki nilai ideologi politis tersebut,

sebenarnya berasal dari semangat *juche* yang secara historis dari masyarakat Korea Utara.<sup>11</sup>

## **B. Perkembangan Krisis Nuklir 2002 di Semenanjung Korea**

Krisis nuklir yang terjadi di tahun 2002 sebenarnya adalah sebuah imbas dari konflik berkepanjangan yang belum ada penyelesaian secara nyata sejak berakhirnya penjajahan Jepang di Semenanjung Korea di tahun 1948. Seperti telah diketahui bahwa persaingan perluasan hegemoni antara dua kekuatan ideologi negara adikuasa telah membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian yang secara ideologis bertolak belakang.

Perbedaan ideologi ini membawa dampak yang besar terhadap hubungan dari negara – negara yang terlibat langsung dalam konflik ini, terutama bagi Korea Selatan dengan dukungan Amerika Serikat, dan Korea Utara dengan dukungan penuh dari kekuatan Uni Soviet dan China.

Kedua kekuatan ini saling memberikan pengaruhnya untuk mempertahankan hegemoninya di Semenanjung Korea. Puncaknya ketika terjadi perang Korea di tahun 1950, kekuatan Korea Utara dan Korea Selatan dengan dukungan penuh dari negara pendukungnya (Amerika Serikat dan Uni Soviet – China) saling menyerang dan bertahan sesuai dengan strategi perang masing masing pihak yang bertikai. Perang ini kemudian diakhiri dengan kesepakatan gencatan senjata di tahun 1953.

Seiring dengan berjalannya waktu dan peta politik dunia yang terus berkembang, kekuatan hegemoni kapitalisme liberal di bawah dukungan Amerika Serikat memenangkan persaingan dan di sisi lain hegemoni Komunisme mulai terpuruk dengan ditandai jatuhnya sistem dan ideologi komunisme di Uni Soviet.

Berkurangnya dukungan dari Uni Soviet menjadikan Korea Utara menjadi sebuah negara yang tertutup dan menjadikan pemimpinya memiliki karakter yang temperamen. Pola kepemimpinan ini menjadikan Korea Utara menjadi negara yang sangat sensitif terhadap perkembangan politik di luar negeri, terutama di sekitar kawasan Semenanjung Korea.

---

<sup>11</sup>Seung-wan Kim, *Washington Quarterly*, Vol.26, no.1. 2002/2003 dalam Lina Alexandra, "Faktor AS dalam Hubungan Dua Korea", dalam Koran Tempo, 5 maret



## 1. Peran Amerika Serikat Dalam Krisis di Kawasan

Peran Amerika Serikat dalam krisis sangat besar, terutama peran sebagai pemicu terjadinya krisis. Dalam kasus krisis nuklir di tahun 2002 ini, konflik sebenarnya yang terjadi adalah antara Korea utara dan Amerika Serikat. Pernyataan presiden Amerika Serikat yang bernada provokatif tersebut telah memicu pemerintahan Korea Utara untuk mengambil langkah yang konfrontatif atas pernyataan tersebut.

Setelah krisis makin menegang dengan ditandai oleh keluarnya Korea Utara dari NPT dan pengusiran pejabat IAEA dari wilayah Korea Utara, Amerika Serikat semakin intensif menjalankan beberapa langkah penyelesaian Krisis nuklir ini. Beberapa langkah telah diambil oleh Amerika Serikat dalam upaya untuk mendukung kebijakannya di semenanjung Korea. Penerapan kebijakan tersebut merupakan perubahan radikal dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, dan memerlukan tidak hanya kemampuan militer namun juga intelejen yang tangguh. Sejak dilantiknya George W. Bush sebagai presiden Amerika Serikat, operasi mata mata yang dilakukan oleh *Central Intelligence Agency (CIA)* di Korea Selatan semakin meningkat, sedikitnya terdapat lima orang agen CIA yang bekerja di Korea Selatan dengan gaji dari kedutaan besar Amerika Serikat di Seoul dan mereka dibantu oleh puluhan pegawai lainnya. Tugas dari para agen CIA ini adalah memberikan nasehat kepada Duta Besar Amerika Serikat di Seoul berdasarkan dari apa yang telah diperoleh, dan mereka dituntut untuk menyumbangkan ide bagi kebijakan pemerintahan Bush terhadap Korea Utara.<sup>12</sup>

Dari beberapa tindakan Amerika Serikat yang konfrontatif dan bersifat memicu konflik ini, keadaan di semenanjung Korea pun menjadi semakin tegang. Korea Selatan kemudian mulai membuat propaganda tentang dibukanya kembali reaktor nuklir yang mereka miliki. Ketegangan di zona DMZ juga semakin tinggi, terutama pengkonsentrasian kekuatan militer di sepanjang zona ini, baik penambahan jumlah personel maupun artileri dari pihak Korea Utara dan pihak Korea Selatan.

Di dalam upaya penyelesaian di meja perundingan, Amerika Serikat juga gencar melakukan upaya penyelesaian dengan mengajak negara negara

---

<sup>12</sup>Koran Tempo, 3 Agustus 2001, "Aksi Intelejen AS di Korea Selatan Meningkat", hal 12

sekutunya di kawasan semenanjung Korea seperti Jepang dan Korea Selatan untuk turut aktif dalam upaya penyelesaian konflik di meja perundingan.

Amerika Serikat juga mengupayakan untuk melibatkan negara negara sekutu dari Korea Utara seperti China dan Rusia untuk turut serta dalam perundingan seperti permintaan dari negara negara ini. Dari upaya untuk melibatkan beberapa negara di kawasan untuk ikut aktif dalam perundingan konflik ini, juga ditanggapi dengan hati hati oleh Korea Utara. Korea Utara kemudian tidak dengan mudah menerima tawaran ini.

Keengganan Korea Utara untuk berunding satu meja dengan banyak negara di kawasan ini juga makin mempersulit upaya diplomasi menuju penyelesaian damai dari krisis nuklir ini.

## **2. Peran Korea Utara Dalam Krisis di Kawasan**

Korea Utara dalam krisis nuklir di kawasan semenanjung Korea memiliki peranan utama, karena dengan keputusannya yang berani untuk melanggar isi perjanjian yang ditandatangani di tahun 1994, mengusir pejabat IAEA, dan mengaktifkan kembali reaktor nuklirnya. Pasca pernyataan diri dari Korea Utara ini, ketegangan di semenanjung Korea meningkat.

Bukan hanya Korea Selatan atau Amerika Serikat saja yang terganggu dengan sikap Korea Utara ini, akan tetapi juga beberapa negara di sekitar kawasan yang juga terancam dengan keputusan Korea Utara ini, seperti Jepang, Cina, dan Rusia. Jepang misalnya, sangat terganggu dengan aktifitas militer Korea Utara pasca pembukaan reaktor nuklir Korea Utara, hal ini sangat beralasan karena di saat krisis tersebut Korea Utara melakukan uji coba peluncuran dan peledakan peluru kendali buatannya yang diarahkan ke Laut Jepang.

Kondisi ini juga diikuti dengan ketegangan di batas perairan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pasca pernyataan Korea Utara yang menjadikan krisis, ketegangan mulai terjadi di perbatasan perairan laut kedua negara tersebut, patroli patroli militer kedua negara seringkali bersiterang dan bahkan terjadi baku tembak, kadangkala juga terjadi pengusiran dan bahkan

penangkapan nelayan yang mencari ikan melewati batas wilayah negara mereka.

### **C. Respon Korea Selatan Dalam Penyelesaian Konflik**

Salah satu hal yang membuat Amerika Serikat lebih berhati-hati dan penuh pertimbangan dalam menentukan kebijakan politik luar negerinya terhadap pengembangan nuklir Korea Utara ini adalah adanya ketidaksepahaman antara pendapat sebagian pejabat Amerika Serikat dengan negara-negara di sekitar kawasan yang menjadi aliansinya seperti Korea Selatan dan Jepang. Perbedaan pendapat ini adalah seputar perlakuan yang akan diambil dan diterapkan terhadap Korea Utara. Tindakan tegas dan keras yang diusulkan oleh Amerika Serikat ternyata ditentang oleh sekutunya di kawasan Semenanjung Korea (Jepang dan Korea Selatan). Jepang dan Korea Selatan lebih cenderung untuk menjembatani kasus yang dilihat kedua negara ini sebagai konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

Kemauan Korea Selatan untuk turut serta dalam penyelesaian konflik antara Korea Utara dan Amerika Serikat adalah sangat beralasan, beberapa alasan ini adalah sebagai berikut :

1. Korea Selatan sedang dalam upaya menciptakan reunifikasi Korea, oleh karena itu dengan adanya konflik ini Korea Selatan berupaya turut menyelesaikan dengan upaya damai, karena negara yang berkonflik dengan Korea Utara adalah sekutu tradisional Seoul, yaitu Amerika Serikat.
2. Terjadinya ketegangan di kawasan yang disebabkan oleh konflik kedua negara ini sangat mengganggu stabilitas kawasan, baik stabilitas keamanan, politik, dan juga ekonomi, dan apabila ini dibiarkan maka akan membuat ketahanan dalam negeri Korea Selatan semakin melemah. Oleh karena itu Korea Selatan ingin turut serta dalam penyelesaian konflik ini, walaupun lebih berperan sebagai mediator akan tetapi Korea Selatan masih memiliki sedikit pengaruh dalam upaya untuk mengontrol keputusan yang diambil nantinya, dalam rangka untuk menjaga kondisi kawasan tetap stabil.

3. Dimasa pemerintahan sipil saat ini, penyetaraan diri dengan Amerika Serikat dalam mengambil keputusan menjadi sangat penting. Saat ini tidak semua yang diusulkan oleh Amerika Serikat langsung diterima dan dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan tuntutan masyarakat Korea Selatan yang menginginkan kesetaraan dengan Amerika Serikat. Demikian juga usulan dari Amerika Serikat untuk melakukan tindakan yang represif terhadap Korea Utara ditolak oleh Korea Selatan dan bahkan mengusulkan untuk melibatkan diri dalam penyelesaian damai dalam konflik tersebut.

Dengan tetap menjaga hubungan diplomatiknya dengan kedua negara konflik, Korea Selatan merespon konflik yang terjadi ini dengan turut serta masuk dalam negara – negara peserta perundingan damai seputar krisis nuklir 2002. Selain China, Jepang, dan Rusia, Korea Selatan mengajukan diri untuk menjadi anggota perundingan multilateral dan berupaya untuk berperan aktif dalam perundingan damai enam negara ini.

Langkah ini adalah sebuah langkah efektif dari Korea Selatan untuk menjaga kepentingannya atas kedua negara konflik ini tetap terjaga dan terkontrol. Karena dengan turut terlibat menjadi negara peserta perundingan, Korea Selatan memiliki *bargaining power* yang legal, kuat, dan mempunyai pengaruh dalam penentuan keputusan.

#### **D. Respon Dunia Internasional dan Regional terhadap Krisis Nuklir Korea Utara**

Sejak Korea Utara dituduh Presiden AS George W. Bush sebagai salah satu negara yang merupakan 'poros kejahatan' dunia, ketegangan di Semenanjung Korea nampak terus meningkat. Korea Utara telah melakukan manuver berbahaya, yang antara lain tercermin dalam sikapnya untuk tidak terikat dengan perjanjian non-proliferasi nuklir sejak 1 Januari 2003 dan kemudian melanjutkan kembali aktifitas reaktor nuklir di Yongbyon. Reaktor berkekuatan lima megawatt ini memiliki persediaan 8000 *nuclear fuel rods*, yang dengan mudah dapat dirobah fungsinya untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir.

Langkah Korea Utara tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab jika ketegangan terus bereskalasi menjadi krisis perang terbuka, maka dampaknya tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di kawasan tetapi juga perdamaian dunia.

Berbagai macam provokasi militer dan retorika dilakukan oleh Korea Utara dengan tujuan agar AS bersedia melakukan perundingan secara bilateral. Menteri Luar Amerika Serikat Collin Powell saat berkunjung ke China, Jepang dan Korea Selatan bulan Februari 2003, mensyaratkan agar Korea Utara menghentikan semua aktifitas program nuklirnya, baru AS bersedia berunding melalui forum multilateral dengan melibatkan kawasan. Kunjungan tersebut nampaknya kurang membuahkan hasil sebagaimana diharapkan, sebab China menyerahkan sepenuhnya kepada AS untuk menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan Korea Selatan tetap menghendaki agar AS bersedia melakukan perundingan dengan Korea Utara secara langsung agar dapat menemukan solusi yang tepat bagi penyelesaiannya.

China sebenarnya bisa berperan membantu meredakan ketegangan di kawasan, sebab pengaruhnya cukup kuat terhadap Korea Utara. Selain jalinan hubungan dagang, Korea Utara sampai saat ini memperoleh pasokan bahan bakar minyak dan merupakan penerima bantuan paling besar dari China. Pemerintah China nampak ragu mengambil sikap, menghadapi dilema apakah harus mempertahankan aliansi strategisnya dengan Korea Utara atau memilih tetap bersikap *inward-looking* dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negerinya. Tekanan ekonomi China kepada Korea Utara akan mengakibatkan bangkrutnya negara tersebut yang berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan dan hilangnya wilayah pengaruh tradisional, ditambah lagi dengan adanya banjir pengungsi dari Korea Utara. Di lain pihak agar perekonomiannya dapat tumbuh secara berkesinambungan, China harus tetap memperhitungkan faktor AS sebagai mitra dagang utama termasuk sumber investasi bagi peningkatan pertumbuhan ekonominya.

Manuver dan provokasi Korea Utara merupakan ancaman serius bagi keamanan Jepang. Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba baru-baru ini menegaskan, Jepang akan melakukan serangan militer pada Korea Utara jika negara tersebut terbukti akan menyerang Jepang dengan rudal balistik. Jika serangan itu

dilaksanakan, merupakan tindakan membela diri yang diijinkan oleh Konstitusi Jepang. Korea Utara diminta menghentikan program nuklirnya dan menyelesaikan melalui jalur diplomasi. Selain itu Tokyo juga tengah mempertimbangkan kembali apakah akan terus berpartisipasi dalam melanjutkan program pembangunan reaktor air ringan di Korea Utara yang dilakukan *Korean Peninsula Energy Development Organisation* (KEDO). Organisasi ini merupakan hasil tindak lanjut Kerangka Persetujuan yang dicapai antara AS dan Korea Utara tahun 1994, yang beranggotakan AS, Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa bagi penyelesaian krisis nuklir tersebut.

Presiden Korea Selatan yang baru, Roh Moo-hyun, selain menegaskan bahwa program senjata nuklir Korea Utara merupakan ancaman serius terhadap perdamaian dunia, namun dalam kebijakan luar negerinya tetap berusaha melakukan *engagement* terhadap Korea Utara. Melalui kebijakan Perdamaian dan Kesejahteraan yang merupakan kelanjutan dan nama baru *Sunshine Policy*-nya mantan Presiden Kim Dae Jung, hubungan dengan Korea Utara akan dilaksanakan melalui dialog berdasar rasa saling percaya serta meningkatkan hubungan timbal balik. Sementara kalangan di dalam negeri bersikap skeptis terhadap kebijakan Presiden Roh tersebut, mengingat pelaksanaan *Sunshine Policy* selama ini dianggap lebih banyak menguntungkan Korea Utara secara ekonomis, apalagi terungkap pula bahwa untuk memuluskan berlangsungnya KTT Perdamaian antara Kim Dae Jung dengan Kim Jong Il pada tanggal 20 Juni 2000 di Pyongyang, Korea Selatan melalui perusahaan Hyundai telah menyalurkan dana sebesar seratur sembilan puluh delapan juta US dollar kepada Korea Utara.

Selama ini Korea Utara berusaha membuka diri pada masyarakat internasional dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menghadapi kesulitan ekonomi yang akut ditambah lagi sekitar 23 juta rakyatnya menderita kekurangan pangan, Korea Utara sebagai penganut ideologi komunis dengan sistem pemerintahan totaliter yang tertutup dengan sengaja telah memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Beberapa analisa menyebutkan bahwa langkah berbahaya itu terpaksa ditempuh untuk mengusahakan lebih banyak bantuan dan kompensasi ekonomi semaksimal mungkin dari masyarakat internasional. China dan Rusia sebagai sekutu tradisionalnya yang selama ini

diharapkan banyak membantu, nampak semakin membuat jarak karena mengamankan faktor domestik dan memelihara kepentingan strategis mereka mendatang.

### **Engagements Uni Eropa (UE)**

Salah satu prinsip dasar pelaksanaan kebijakan luar negeri UE terhadap kawasan lain, termasuk Asia ialah melaksanakan *engagement* sehingga bisa diperoleh nilai tambah yang bermanfaat. Seandainya kontribusi UE dipandang tidak begitu signifikan, namun UE harus dapat menawarkan sesuatu dan tentu saja perlu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Dengan demikian, eksistensi UE melalui *engagement*, peran aktif dan citra positif di masa mendatang pantas memperoleh penghormatan dari masyarakat internasional. Dalam konteks krisis nuklir di Korea Utara, meski disadari bahwa pelaku utama untuk dapat menyelesaikan melibatkan AS, Korea Selatan dan Jepang, namun peran China, Russia dan Uni Eropa tidak dapat dikesampingkan.

Terhadap ketegangan di Semenanjung Korea, dalam sidang Dewan Menteri Uni Eropa pada tanggal 19 November 2002 mengeluarkan deklarasi yang menegaskan kekhawatiran atas program pengembangan pengayaan uranium sebagai bahan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara. UE meminta Korea Utara untuk segera menghentikan program tersebut karena telah melanggar ketentuan internasional seperti perjanjian non-proliferasi nuklir (NPT), *International Atomic Energy Agency (IAEA)* dan *Safeguard Agreement* dan *North-South Joint Declaration on Denuclearation and the Agreed Framework* selain itu juga ditegaskan bahwa UE tetap mempunyai komitmen untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan dan pangan kepada rakyat Korea Utara. Presiden Denmark atas nama UE pada tanggal 27 Desember 2002, menyampaikan keprihatinannya atas adanya indikasi bahwa Korea Utara akan menghentikan kerjasamanya dengan IAEA dan mengharapkan agar Korea Utara tetap melakukan kerjasama dengan badan tersebut.

Para Menlu UE dalam pertemuan di Brussel tanggal 27 Januari 2003 sepakat untuk mengirim utusan ke Korea Utara dipimpin oleh Xavier Solana, namun rencana kunjungan tersebut tidak dapat terlaksana. Setelah mengunjungi Jepang dan Korea Selatan dari tanggal 9 - 12 Februari 2003, Xavier Solana menegaskan bahwa ancaman proliferasi senjata pemusnah massal bersifat global, oleh karena itu UE bersedia mengambil peran dalam mengupayakan perdamaian. Beberapa alasan mengapa Korea Selatan, dan Jepang meminta UE untuk terlibat, karena menginginkan adanya koalisi diperluas menghadapi proliferasi senjata nuklir, dan UE dianggap tidak mempunyai kepentingan strategis, selain terciptanya stabilitas kawasan. Selain itu juga mengharapkan UE tetap menyalurkan bantuan dan menjalin dialog dengan pusat pemerintahan di Korea Utara demi penyelesaian krisis.

Presiden Yunani dalam pernyataannya mendukung Resolusi IAEA tanggal 12 Februari 2003, yang menyebutkan bahwa Korea Utara telah melanggar ketentuan perjanjian non-proliferasi nuklir. UE akan membantu upaya penyelesaian secara damai dengan antara lain melakukan koordinasi dengan pihak negara terkait termasuk mengirimkan misi ke Korea Utara jika situasi dan kondisi memungkinkan. Dalam kaitan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Yunani, Tassos Giannitsis selaku Presiden UE saat menemui Presiden Korea Selatan Roh Moo-Hyun tanggal 26 Februari 2003, mengemukakan bahwa UE akan berusaha membantu mencari penyelesaian krisis nuklir di Semenanjung Korea dan tetap akan melanjutkan bantuan kemanusiaan pada Korea Utara.

Korea Utara terus melakukan provokasi, sementara di lain pihak AS tetap menolak untuk berunding secara bilateral. Presiden Bush bahkan mengisyaratkan bila jalur diplomasi gagal, maka akan menempuh opsi tindakan militer untuk menghindarkan Korea Utara memproduksi senjata nuklir. Selain itu AS dan Korea Selatan telah menggelar latihan perang besar-besaran pada awal bulan Maret. Dalam situasi jalur diplomasi seolah mengalami kebuntuan, UE kiranya dapat lebih aktif berperan dengan mencari terobosan untuk melakukan mediasi kepada penguasa di Pyongyang. Beberapa faktor yang memungkinkan UE dapat ikut berperan membantu



membujuk Korea Utara melakukan dialog, ialah hubungan UE - Korea Utara selama ini terjalin dengan baik, apalagi 13 negara anggota UE mempunyai hubungan diplomatik dan tiga diantaranya membuka kantor perwakilannya di Pyongyang. UE merupakan salah satu donor terbesar kepada Korea Utara.

Adanya akses diplomatik UE di Pyongyang merupakan salah satu 'aset' bagi Presiden Yunani yang perlu dimanfaatkan secara maksimal. Forum pertemuan dialog politik antara para pejabat senior UE dan Korea Utara yang sejak tahun 1998 telah berlangsung lima kali, perlu dilanjutkan tidak hanya sebagai wahana meningkatkan jalinan hubungan bilateral semata, namun yang lebih penting agar eskalasi krisis nuklir Korea Utara dapat dihindarkan. Di saat banyak negara lain mempertimbangkan kembali bantuannya kepada Korea Utara, kesediaan UE untuk terus membantu khususnya bantuan kemanusiaan merupakan '*leverage*' tersendiri dalam menjalin *engagement*, disamping kesediaan UE untuk membuka pasarnya bagi produk ekspor dari Korea Utara. Bantuan UE yang telah disalurkan kepada Korea sebesar €393 juta (US\$ 427 juta) sejak tahun 1995, berupa bantuan pangan, dukungan untuk rehabilitasi sektor pertanian, bantuan kemanusiaan non pangan, bantuan teknik dan sumbangan melalui KEDO (sebesar €95 juta, dan memberikan komitmen €20 juta sampai dengan tahun 2005). Bantuan itu belum termasuk sumbangan tambahan dari negara anggota UE secara bilateral.

Dalam hubungan transatlantik dengan AS, Presidensi Yunani untuk sementara berhasil 'menyatukan' suara melalui kompromi mengenai penyelesaian damai masalah krisis Irak dalam KTT Luar biasa di Brussel tanggal 17 Februari 2003. Berkaitan dengan ketegangan di Semenanjung Korea, Presiden Yunani di lain pihak bisa melakukan pendekatan kepada AS agar bersedia melakukan perundingan langsung dengan Korea Utara. Perundingan bilateral tersebut tidak dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan Korea Utara agar AS mau memberikan 'santunan' ekonomi, namun dimanfaatkan sebagai wahana menyusun agenda bersama untuk perundingan berikutnya secara multilateral dalam rangka penyelesaian damai ancaman krisis nuklir Korea Utara secara tuntas?